

Islam dan Modal Sosial Orang Minangkabau di Perantauan

Jufri Naldo

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

aldo_bros@yahoo.co.id

Abstract

Islam has a strong foundation for social contracts and norms agreed upon by its people. Minangkabau people overseas try to optimize the tangible manifestation of these Islamic teachings. So Islam is very influential and colors their social capital. This can be seen when Minangkabau ethnic group organizations formed overseas do not only interpret Islamic teachings as limited to regular routine worship, but Islam has participated in the dialectics of the organization's social capital which in turn directs the activities of the ethnic community to social movements. productive and positive to build an ideal community life. In the view of the Minangkabau people, Islam is not only a reference to social behavior in social life. Islam is also one of ethnic identities. In an anthropological perspective, between Islam and the Minangkabau is an inseparable unity. These two elements determine one another and one's membership in the community is largely determined by the attachment of that identity.

Keywords: *Islam, Social Capital, Minangkabau People.*

Abstrak

Islam memiliki landasan yang kuat terhadap kontrak sosial dan norma yang telah disepakati umatnya. Orang Minangkabau di perantauan berusaha mengoptimalkan wujud nyata dari ajaran Islam tersebut. Sehingga Islam sangat berpengaruh

dan mewarnai modal sosial mereka. Hal ini terlihat ketika organisasi-organisasi kelompok etnis Minangkabau yang terbentuk di perantauan tidak hanya menafsirkan ajaran Islam hanya sebatas pada ibadah rutinitas biasa, akan tetapi Islam telah ikut serta dalam dialektika kapital sosial organisasi yang pada gilirannya mengarahkan kegiatan komunitas etnis itu kepada gerakan-gerakan sosial yang produktif dan positif untuk membangun kehidupan masyarakat yang ideal. Dalam pandangan orang Minangkabau, Islam tidak hanya sebagai referensi perilaku sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Islam juga merupakan salah satu identitas etnis. Dalam perspektif antropologis, antara Islam dengan orang Minangkabau merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua unsur tersebut saling menentukan dan keanggotaan seseorang dalam komunitas sangat ditentukan oleh kelekatan identitas tersebut.

Kata kunci: *Islam, Modal Sosial, Orang Minangkabau.*

A. Pendahuluan

Etnis Minangkabau dikenal sebagai komunitas yang kuat memegang identitas sebagai muslim dan taat pada aturan-aturan adat. Ajaran Islam sangat merasuk dalam kehidupannya, sehingga Islam dapat menjadi parameter dalam lingkup sosial-budaya mereka. Pernyataan ini dapat dijumpai dalam pepatah; *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai* (Adat Bersendikan Syari'at, Syari'at Bersendikan Kitabullah, Syari'at Berkata Adat Memakai), yang bermakna bahwa ajaran Islam menjadi dasar perilaku masyarakat Minangkabau di setiap lini kehidupannya.¹

Di lain sisi, predikat yang sering dilekatkan kepada etnis Minangkabau di samping memiliki sikap fanatik terhadap agama juga dikenal sebagai etnis yang gemar merantau. Merantau, secara

¹ Ramayulis, "Traktat Marapalam, *Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah* (Diktum Keramat Konsensus Pemuka Adat dengan Pemuka Agama Dalam Memadukan Adat dan Islam di Minangkabau- Sumatera Barat)", Paper dipresentasikan dalam acara Annual Conference on Islamic Studies (AICIS) ke 10, 2010.

bahasaberasal dari bahasa Melayu, Indonesia, dan Minangkabau yang sama arti dan pemakaiannya dengan akar kata “rantau”.² “Rantau” ialah kata benda yang berarti daratan rendah atau daerah aliran sungai yang biasanya dekat ke-atau bagian dari daerah pesisir. “Merantau” ialah kata kerja yang berawalan “me” yang berarti pergi ke rantau.³

Adapun faktor yang menyebabkan mengapa orang Minangkabau memilih untuk merantau adalah dikarenakan; (1) Faktor ekonomi, karena berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi mata pencaharian pokok keluarga. (2) Faktor ekologis dan geografis, karena Minangkabau secara administratif adalah daerah yang terpencil di luar pusat perdagangan dan politik, sehingga orang luar enggan untuk mendatangi Minangkabau. (3) Faktor budaya, karena Minangkabau menganut sistem kekerabatan Matrilineal. Dengan sistem ini, penguasaan harta pusaka dipegang oleh kaum perempuan sedangkan hak kaum pria dalam hal ini cukup kecil. Selain itu, ketika masa akil baligh (dewasa) tiba, para pemuda tidak dapat lagi tinggal di rumah orang tuanya, karena rumah hanya diperuntukkan untuk kaum perempuan dan anak-anak. (4) Faktor pendidikan, karena setiap pelajar yang pergi merantau membukakan jalan bagi pelajar berikutnya untuk melakukan hal yang sama. Cerita-cerita tentang kemajuan dan keberhasilan yang terdengar dalam pencapaian pendidikan oleh pelajar ini mendorong yang muda-muda untuk bisa mengikuti jejak langkah para pendahulunya. (5) Faktor perang, karena peperangan telah menimbulkan gelombang perpindahan penduduk Minangkabau terutama dari daerah konflik, setelah perang Paderi, muncul pemberontakan di Batipuh menentang tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda. Setelah kemerdekaan

² Menarik bahwa istilah “merantau” atau istilah lain dengan konotasi yang serupa tidak ditemukan dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Madura, maupun Bali. Istilah “lelana” atau “kelana” (Jawa) lebih berarti sebagai “petualangan”, sama dengan istilah “marjajo” dalam bahasa Batak.

³ Teuku Iskandar, *Kamus Dewan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1970), hlm.931 dan W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ed. Ke-II (Jakarta: Balai Pustaka, 1966), hlm. 125.

muncul PRRI yang juga menyebabkan timbulnya eksodus besar-besaran masyarakat Minangkabau ke daerah lain.⁴

Faktor selanjutnya adalah dorongan filosofi Minangkabau yang tertuang dalam syair-syair pepatah adat yang juga menjadi motivasi orang untuk pergi meninggalkan kampung halamannya.⁵ Syair-syair dalam pepatah yang sarat dengan suruhan merantaujuga menjadi cerminan identitas budaya bagi masyarakat Minangkabau. Sampai saat ini merantau masih menjadi suatu tradisi budaya yang tetap berlangsung. Selain untuk berusaha mencari penghidupan, merantau juga berfungsi untuk mempelajari ilmu pengetahuan, keterampilan, dan mencari pengalaman. Koentjaningrat menegaskan bahwa tradisi merantau juga dapat menambah kekerabatan dengan etnis-etnis lainnya.

Dari hasil studi yang dilakukan oleh Mochtar Naim pada tahun 1961, ditemukan bahwa terdapat sekitar 32% orang Minangkabau yang berdomisili di luar daerah administratif Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 1971 jumlah itu meningkat menjadi 44%.⁶ Namun, berdasarkan sensus terbaru tahun 2010, etnis Minangkabau yang tinggal di Sumatera Barat berjumlah 4,2 juta jiwa, dengan perkiraan hampir separuh orang Minangkabau berada di perantauan. Para perantau Minangkabau ini kebanyakan berada di kota-kota besar di Indonesia dan Mancanegara.⁷

Potret migrasi semacam ini hampir mirip dengan fenomena migrasi yang dilakukan oleh etnis-etnis nusantara lainnya, seperti etnis Madura dan Cina. Etnis-etnis yang dikenal dengan etos kerja pantang menyerah, mandiri, dinamis, memiliki semangat

⁴ Taufik Abdullah, dalam pengantar buku Audreu Kahin, *Dari Pemberontakan ke Intergrasi "Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1928-1998"* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), xi.

⁵ Wawancara dengan pedagang Pasar Giwangan Yogyakarta, bapak Yurnalis, sekaligus sebagai pengurus paguyuban *Solok Saiyo Sakato* (S3). 10 Februari 2018.

⁶ Mochtar Naim, *Merantau "Pola Migrasi Suku Minangkabau"*, ed. Ke-III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 61.

⁷ Asyari, *Religiusitas dan Culture Belief dalam Prilaku Ekonomi Orang Minangkabau di Sumatera Barat, Disertasi* (Indonesia: Universitas Andalas, 2006), hlm. 30.

berwirausaha dan sebagai makhluk ekonomi-pasar yang ulet.⁸ Kesamaan dengan etnis Madura adalah mereka sama-sama etnis migran yang tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai Islam dan banyak menekuni dunia wirausaha di tempat dimana pun mereka hidup.⁹ Karenanya, dengan karakter demikian, dimana saja di seluruh pelosok nusantara, hampir bisa ditemui kedua kelompok etnis itu. Orang Madura dikenal dengan masakan sate, soto, dialek bahasa dan humor etnisnya, sementara orang Minangkabau dikenal dengan ciri khas masakan dan rumah makannya.¹⁰

Dengan predikat etnis yang gemar merantau, orang Minangkabau umumnya bekerja di sektor-sektor informal, misalnya sebagai pedagang kuliner (rumah makan), pedagang pakaian, penjaja kaki lima, dan lain sebagainya yang bisa ditemui di berbagai sudut kota di nusantara. Ketekunan dan keuletandalam bekerja tersebut merupakan keniscayaan yang tercermin dalam perilaku kehidupan sosial orang Minangkabau di perantauan. Karakter itu termotivasi karena faktor-faktor yang telah disebutkan diatas dan didukung oleh dua variabel kunci yang mereka miliki, yaitu modal sosial dan jaringan perantauan sehingga pada gilirannya memacu mereka untuk *survive*, kapan dan dimana pun mereka berada.¹¹

Secara teoritis, modal sosial adalah kemampuan individu-individu untuk mengatur sumber-sumber langka berdasarkan keanggotaan mereka dalam jaringan atau struktur sosial yang lebih luas.¹² Bagi orang Minangkabau, kemampuan menggerakkan

⁸ Tsuyoshi Kato, "Rantau Pariaman Dunia Saudagar Pesisir Minangkabau Abad XIX", dalam *Indonesia Dalam kajian Ekonomi Sarjana Jepang : Perubaban Sosial Ekonomi Abad XIX dan Berbagai Aspek Nasionalisme*, ed. Akira Nagazumi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986, hlm. 77.

⁹ Muhammad Djakfar, *Anatomi Perilaku Bisnis "Dialektika Etika dengan Realitas"*, Disertasi (Indonesia: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 3.

¹⁰ Wawancara dengan Usman Pelly. Antropolog Universitas Negeri Medan. 10 Mei 2017.

¹¹ Slamet Yulius, *Modal Sosial dan Kemiskinan – Tinjauan Teoritik dan Kajian di Kalangan Penduduk Miskin di Perkotaan*, (Surakarta: UNS press, 2012), hlm. 30.

¹² Alejandro Portes, *The Economic of Immigration*, (New York: Russel Sage Foundation, 1995), hlm. 12-13.

jaringan hubungan agama, sosial budaya dan politik dalam merantau adalah sebuah keuntungan. Kepiawaian dalam menggunakan modal sosial dapat memberikan banyak peluang dan kesempatan. Ketika para pembentuk jaringan hubungan sosial tersebut memiliki rasa saling percaya maka salah satu pihak dapat saja memberikan modal kepada pihak lain.

Dalam skema Pierre Bourdieu, modal sosial adalah sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari jaringan sosial sehingga terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain; keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan manfaat kepada anggotanya dalam berbagai bentuk dukungan kolektif.¹³

Sementara Putnam, juga mendefinisikan bahwa kapital sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat. Kapital sosial sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooporasi) untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu *social networks (networks of civic engagement)* atau ikatan dan jaringan sosial yang ada dalam masyarakat dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Bahkan Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horizontal, tidak hanya yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan).¹⁴

Berbeda antara Bourdieu dan Putnam, Sosiolog James Coleman, cenderung lebih menyederhanakan definisi modal sosial itu yang mengatakan bahwa modal sosial tidak terbatas pada mereka yang kuat, namun juga mempunyai manfaat nyata bagi orang miskin dan komunitas yang terpinggirkan. Coleman memaknai modal

¹³ Pierre Bourdieu, *The Forms of Capital*, (New York: Greenwood, 1986), hlm. 24

¹⁴ Putnam, R.D, Bowling Alone: America's Declining Social Capital, *Journal of Democracy*, no. 6 (1995):hlm. 65-78.

sosial dari fungsinya bahwa modal sosial bukan merupakan entitas tunggal, tetapi ada beberapa macam entitas yang mempunyai dua karakteristik bersama. Modal sosial terdiri atas beberapa aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan tertentu dari seseorang yang ada dalam struktur itu.¹⁵

Coleman membedakan jenis modal sosial dari aspek hubungan yang didasarkan pada rasa saling percaya dan otoritas. Kedua aspek menjadi dasar dalam membentuk jaringan keluarga dan organisasi sosial. Hubungan saling percaya merupakan aspek penting dalam membangun kerjasama dengan lingkungan sosial dan jumlah kewajiban. Jumlah kewajiban ditentukan oleh faktor-faktor yang berbeda, misalnya kebutuhan, keberadaan sumber bantuan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Seperti yang terlihat dari penjelasan Coleman, secara umum konsep modal sangat dekat kaitannya dengan sistem produksi dan ekonomi. Namun dalam perkembangan selanjutnya konsep modal semakin meluas setelah merebaknya studi-studi mengenai modal sosial yang banyak dilakukan dan dikaitkan dengan bidang sosial dan politik, ataupun pembangunan secara umum, seperti yang dilakukan oleh Bourdieu, Putman, maupun Coleman, yang dikenal sebagai penggagas utama teori modal sosial yang dikaitkan dengan teori pilihan rasionalnya, serta pada beberapa dekade terakhir juga giat didukung oleh studi-studi yang dilakukan World Bank.

Setelah Bourdieu mengemukakan beberapa jenis kapital selain kapital ekonomi yang dikemukakan dalam karyanya "*The Forms of Capital*" dan ditambah dengan teori modal sosial Coleman yang juga sangat dekat dengan kegiatan ekonomi, sering dipersepsikan bahwa konsep modal merujuk pada referensi ekonomi yang terbatas, yakni belum adanya upaya untuk mempertimbangkan konsep modal dari referensi yang non-ekonomi, seperti halnya referensi sosiologis atau referensi ilmu sosial pada umumnya. Demikian juga sebaliknya,

¹⁵ Coleman, *Foundation of Social Theory* (USA: Harvard University Press, 1990).

¹⁶ *Ibid.*

konsep-konsep kapital yang bersumber pada referensi ilmu sosial masih relatif kurang merujuk kepada referensi ekonomi sehingga menimbulkan kemandegan dan problematika konsep modal, karena diskusi-diskusi mengenai kapital ini cenderung mengedepankan ego disiplin yang sedemikian kukuh dalam mempertahankan referensi masing-masing.

Diskusi mengenai status ontologis modal dalam referensi ilmu sosial dan sosiologis khususnya dikemukakan oleh sejumlah ahli, baik yang berlatar belakang ekonomi maupun sosiologi. Diskusi status ontologis ekonomi sosial mesti mengedepankan aspek “apanya” dari kapital sosial itu. Kemudian beberapa ahli juga memfokuskan untuk menentukan sumber-sumber modal sosial atau menentukan dimana modal sosial dapat ditemukan.¹⁷ Selain modalsosial, saat ini berkembang diskusi mengenai representasi bentuk-bentuk modal lainnya seperti yang dikemukakan oleh Bourdieu. Menurutnya, selain modal ekonomi, dalam perjuangan untuk memperoleh posisi-posisi obyektif dalam sistem sosial maka penguasaan dan penggunaan berbagai bentuk modal sangat menentukan individu dalam melakukan strategi dan perjuangan meningkatkan posisi obyektif.¹⁸

Modal dalam referensi non-ekonomi mempunyai fungsi penting pada proses produksi. Hal ini senada dengan pandangan Putman (1993) yang mengemukakan bahwa faktor-faktor non-ekonomi turut menentukan jalannya proses produksi dan hasil akhirnya. Dalam menjelaskan hal ini, Lawang memaparkan mengenai bentuk-bentuk kapital dalam sistem produksi, antara lain (i) modal finansial yang dikenal dengan sebagai bentuk modal berupa uang. Akan tetapi dalam konsep ekonomi dan sosiologis, bentuk modal ini dipandang tidak dalam arti sempit itu, melainkan lebih dilihat sebagai simbol dan hak yang justru menekankan aspek

¹⁷ Lawang, R.M.Z., *Stratifikasi Sosial di Cancar-Manggarai Flores Barat, Disertasi* (Indonesia: Universitas Indonesia, 1989), hlm.9.

¹⁸ Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian*, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm.44-45.

kapital finansial sebagai modal dalam bentuk hubungan sosial yang berfungsi mengelola kesempatan memperoleh uang atau dana untuk menjalankan kegiatan ekonomi; (ii) modal fisik yang bersifat nyata (*tangible*) dan dapat diukur. Modal fisik dalam pengertian ini merupakan bentuk modal yang sengaja dibuat manusia untuk keperluan tertentu dalam proses produksi; dan (iii) modal manusia yang menunjuk pada kemampuan yang dimiliki manusia dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan kegiatan ekonomi.¹⁹

Dengan perkembangan itu pada gilirannya konsep modal menghasilkan konsep mengenai bentuk-bentuk modal lainnya yang ikut dipertimbangkan dalam kegiatan ekonomi. Modal itu antara lain meliputi modal personal, modal budaya, dan modal politik. Jika merujuk kembali kepada pemikiran Boerdieu mengenai teori praktek sosial yang melahirkan dua konsep utama yakni ranah (*field*) dan habitus, maka studi ini akan memfokuskan bagaimana agama, dalam hal ini Islam, ikut mewarnai dialektika antara ranah dan habitus etnis Minangkabau di perantauan. Seperti yang diketahui bahwa ranah (*field*) merupakan relasi antara posisi obyektif dari agen atas dasar modal yang dikuasainya. Ketika posisi-posisi itu dicapai, maka agen akan dapat berinteraksi dengan habitus. Ranah juga mencerminkan suatu ruang atau area-area perjuangan. Pencapaian dan perjuangan untuk merebut posisi-posisi obyektif. Menurut Boerdieu sangat ditentukan oleh dua hal yakni kepemilikan atau penguasaan modal dan relasinya dengan posisi obyektif lainnya. Ranah atau lingkungan juga ditegaskan oleh Boerdieu sebagai bentuk pasar kompetisi (*the game of society*) yang sangat ditentukan oleh penguasaan dan penggunaan berbagai jenis modal.²⁰

¹⁹ Robinson, L J, "Is Sosial Capital Really Capital? Review of Sosial Economy", dalam *Review of Sosial Economy*, no.01 (2005), hlm.10.

²⁰ Ritzer, G dan Goodman D.J, *Modern Sociological Theory*, (Mc.Graw-Hill: 2003), hlm. 522.

Variabel selanjutnya adalah jaringan perantauan. Jaringan perantauan orang Minangkabau dapat dijumpai disetiap kota-kota besar di Indonesia. Jaringan ini biasanya melembaga menjadi sebuah paguyuban (kelompok) yang diberi nama daerah dan simbol khas Minangkabau. Fungsi paguyuban (kelompok) etnis Minangkabau ini antara lain adalah, (1) Sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, dan lainnya, (2) Berfungsi untuk mencairkan rasa kesepian karena jauh dari kampung halaman, (3) Berfungsi memberikan tujuan dan nilai hidup yang lebih bernilai, memberikan norma perilaku, dan kesetiaan, dan (4) Kelompok berfungsi memberikan rasa aman dengan memberikan dukungan dan perasaan keikutsertaan dalam aktifitas kegiatan individu.²¹

Dalam masyarakat Minangkabau hubungan jaringan tersebut dikonstruksi melalui sistem kekerabatan Matrilineal yang bermula dari hubungan *semande*, *seperut*, *senenek*, *seninik*, *sekaum* dan *sesuku*. *Semande* menunjuk pada hubungan yang tercipta karena mereka dilahirkan dari seorang ibu yang sama. *Seperut* merupakan jaringan hubungan yang muncul karena sekelompok orang memiliki satu nenek yang sama. *Senenek* merujuk pada suatu jaringan hubungan yang timbul karena sekelompok orang mempunyai satu nenek buyut (*gaek*). Sementara *seninik* mencakup jaringan hubungan yang muncul dari kenyataan bahwa mereka berasal dari *ninie* yang sama. *Sekaum* adalah jaringan hubungan dari suku (marga/klan) yang sama dan dapat ditelusuri kaitan hubungan mereka. Sedangkan *sesuku* merupakan jaringan hubungan yang terbentuk karena memiliki satu suku (marga/klan) yang sama, namun kaitan hubungannya sudah sukar ditelusuri, sebagai contoh sesama marga Chaniago, namun berasal dari nagari yang berbeda.²²

²¹ Wawancara dengan Jufrial. Ketua Ikatan Keluarga Besar Minangkabau Yogyakarta (IKBMY) dan Sekretaris Jenderal IPMI (Ikatan Perantau Minangkabau Indonesia). 10 Desember 2017.

²² Damsar dan Indrayani, Isu-Isu Sosial Budaya, *Jurnal Antropologi*, vol. 18 (Juni 2016): hlm. 29-38.

Sistem itu dapat diperluas dengan hubungan horizontal lokalitas etnik seperti menjadi hubungan senagari, seluhak sampai seminangkabau. *Senagari* merupakan jaringan hubungan lokalitas yang mencakup jaringan hubungan dari beberapa jorong (korong) atau desa dalam suatu nagari. Sedangkan *seluhak* merupakan jaringan hubungan lokalitas yang meliputi satu daerah inti budaya Minangkabau. Dalam konteks budaya Minangkabau, daerah inti meliputi *luhak* Tanah Datar, *Luhak* Agam, dan *Luhak* Limopuluah Koto. Namun dalam konteks Minangkabau kontemporer, konsep *Luhak* telah digantikan oleh hubungan lokalitas administratif pemerintahan seperti kabupaten dan kota, misalnya sesama orang kota Bukittinggi, Payakumbuh dan lain sebagainya. Sedangkan seminangkabau menunjuk pada hubungan lokalitas atau cakupan wilayah budaya Minangkabau. Pada konteks ini, makin kecil lingkaran semakin kohesif jaringan hubungan dan semakin tinggi pula kemungkinan untuk terciptanya saling percaya.²³

B. Pembahasan

1. Nilai Dasar Budaya Minangkabau

Unsur budaya yang universal dan sekaligus menjadi isi dari semua kebudayaan adalah sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian dan sistem teknologi peralatan. Ketujuh unsur kebudayaan ini mencakup seluruh kebudayaan manusia dan kombinasi dari ketujuh unsur ini pula yang menentukan nilai-nilai kehidupan dalam suatu masyarakat.²⁴

Dalam kebudayaan Minangkabau, unsur-unsur tersebut dikemas menjadi sebuah konsep yang disiapkan secara turun-temurun oleh nenek moyang untuk anak cucunya yang pada gilirannya konsep ini menjadi modal sosial orang Minangkabau

²³ *Ibid.*

²⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. Ke-XIII, (Jakarta: PT. Rineka Cita, 1990), hlm. 4.

di manapun mereka hidup, dengan tujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, dan harmoni. Konsep ini sejalan dengan indikator nilai-nilai dasar budaya Minangkabau yang terdiri dari agama, pendidikan, serta nilai kekeluargaan.

Nilai-nilai itu menyatu dalam ruang modal sosial orang Minangkabau di perantauan. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Rante, menjelaskan bahwabudaya etnis memiliki dampak terhadap kinerja karena lebih mengutamakan kepentingan adat dan kebersamaan. Sistem Matrilineal yang terdapat pada masyarakat Minangkabau kendati langka namun diterima oleh masyarakat Minangkabau sampai saat ini. Sistem pengetahuan yang bertumpu pada ajaran “*Alam takambang jadiguru*” (Alam terkembang menjadi guru) menjadi alasan utama bagi pendidikan yang logis dan rasional, serta mendorong kearah kehidupan yang serasi secara alamidan sadar lingkungan.²⁵ Pada gilirannya nilai kekeluargaan dalam kapital sosial orang Minangkabau terlihat dimanapun mereka berada.²⁶

Dari sisi mata pecaharian,dalam studi-studi yang dilakukan oleh para sarjana, menyebutkan bahwa hampir 60% orang Minangkabau di perantauan adalah sebagai wirausaha (informal).²⁷ Keberadaan bisnis orang Minangkabau di perantauan didukung oleh kekuatan nilai-nilai yang bersumber dari sosial budaya daerah asal yang dilandasi ajaran Islam.²⁸

Praktik wirausaha adalah sebuah kegiatan pengembangan sumberdaya manusia yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial-budaya seperti yang terdapat pada masyarakat Minangkabau. Sebagaimana yang sudah disinggung diatas bahwa kondisi geografis dan sosiologis dan ditopang oleh budaya, antara lain menumbuhkan nilai dan

²⁵ Rante, “Pengaruh Budaya Etnis dan Perilaku Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Agribisnis di Provinsi Papua”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, no. 12 (2010): hlm. 133-141.

²⁶ Wawancara dengan Fadli Zon. Ketua IKM (Ikatan Keluarga Minang). 02 Februari 2018.

²⁷ Fauzan, “Pengaruh Religiusitas terhadap Etika Berbisnis (Studi pada RM. Padang di Kota Malang)”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 15, no. 01 (2011): hlm. 53-64.

²⁸ Darwis, R, *Transformasi Nilai-nilai Tradisi Kekeluargaan Masyarakat Minangkabau dalam Pendidikan Kewiraswastaan*, cet. Ke-II, (Bandung: Pustaka Aulia Press, 2004), hlm. 18.

perilaku merantau sebagai ciri dan perilaku orang Minangkabau. Dalam aspek ekonomi memunculkan wirausahawan yang tumbuh dalam beragam bentuk, seperti pengusaha kuliner, pakaian, dan lain sebagainya. Kajian-kajian budaya memberikan kesimpulan bahwa eksistensi bentuk-bentuk usaha tersebut ternyata ditopang oleh kekuatan nilai budaya Minangkabau yang berhasil memberikan landasan nilai bagi tumbuhnya etos kerja dalam pengelolaannya. Welsa (2009) menjelaskan bahwa budaya Minangkabau berpengaruh positif dan signifikan pada bentuk-bentuk usaha yang ada di perantauan, kemampuan usaha disini dalam artian kemampuan (*Capabilities*) yang mengacu pada keterampilan (*skill*).

2. Perjumpaan Islam Dengan Kebudayaan Minangkabau

Kehadiran Islam dalam masyarakat Minangkabau merupakan bentuk penerimaan nilai yang sama sekali baru ke dalam budaya yang sudah terwujud secara mapan.²⁹ Namun, kehadiran budaya baru ke dalam budaya yang sudah ada ini tidak meruntuhkan nilai-nilai dan menghilangkan jati diri budaya lama. Dalam pertemuan dua budaya baru, memungkinkan terjadinya ketegangan. Sebagaimana dalam akulturasi yang berproses di generasi kedua keturunan India Amerika yang pada gilirannya terjadi konflik di antara keluarga.³⁰ Dalam adat Minangkabau, ketegangan ini juga tidak dapat ter-elakkan dengan terjadinya pergolakan antara respon kalangan tradisional terhadap gerakan pembaharu. Bahkan sampai terjadi peperangan.³¹ Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Islam dan adat Minangkabau justru mengalami perpaduan yang saling menguntungkan. Islam dijadikan sebagai bagian dari identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya. Kesatuan Islam dan adat

²⁹ Syarifuddin Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982) iii.

³⁰ Sheetal R. Shah, *The Impact of Acculturation and Religion on Intergenerational Family Conflict for Second Generation Asian Indian Americans*, Tesis (Carbondale: Southern Illinois University, 2006), hlm. 85.

³¹ Zaim Rais, *The Minangkabau Traditionalists' Response to The Modernist Movement*, Disertasi (Montreal: McGill University, 1994), iii.

Minangkabau pada proses berikutnya melahirkan makna khusus yang berasal dari masa lalu dengan menyesuaikan kepada prinsip yang diterima keduanya. Pertemuan arus kebudayaan melahirkan model adaptasi yang berbeda, atau bahkan sama sekali baru dengan yang sudah ada sebelumnya.

Model adaptasi menjadi ‘di antara bentuk akulturasi’. Dengan proses akulturasi yang berjalan beriringan, maka dua arus kebudayaan yang bertemu melahirkan integrasi. Jika ini disebut sebagai model, maka dapat pula menjadi sebuah solusi. Pembentukan identitas yang sudah selesai kemudian memerlukan klarifikasi dari unsur luar. Di tahap awal tentu akan menimbulkan konflik. Tetapi dalam proses yang ada terjadi proses restrukturisasi.³² Ini pula yang muncul dalam beberapa ritual yang ada dalam kebudayaan Islam Minangkabau. Tradisi Islam Arab yang hadir tidak serta merta secara utuh diterima sebagaimana apa yang sudah ada. Tetapi justru dilakukan penyesuaian dengan ritual yang sudah ada dalam tradisi Minangkabau. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keagamaan dalam Islam, maka ritual tersebut tetap dipertahankan dengan melakukan penyesuaian secara harmonis. Penerimaan Islam sebagai ajaran, tidak menghilangkan “wajah lokal” yang diwarisi secara turun temurun. Model adaptasi seperti ini kemudian lahir dari adanya strategi penerimaan yang memungkinkan adanya integrasi dua budaya yang bertemu.³³ Dengan adanya pengakuan masing-masing kehadiran dua budaya selanjutnya memunculkan penyatuan.³⁴

Masuknya Islam dengan membawa ajaran “baru” bagi kebudayaan Minangkabau kemudian mempengaruhi tradisi yang sudah ada. Namun berubahnya budaya yang sudah ada merupakan penyesuaian atas pandangan dan pengakuan kebenaran agama yang diterima. Kemudian budaya Minangkabau hadir dalam bentuk

³² Meike Watzlawik, “Cultural Identity Markers and Identity as a Whole: Some Alternative Solutions”, *Culture and Psychology*, no. 2 (2012), hlm. 253 – 260.

³³ Jenny Phillimore, “Refugees, Acculturation Strategies, Stress and Integration”, *Journal of Social Policy*, no. 3 (Juli 2011), hlm. 575 – 593.

³⁴ Gordon Parker, Depression in the Chinese: The Impact of Acculturation”, *Psychological Medicine*, Vol. 35 (2005), hlm. 1475 – 1483.

nilai dan standar yang baru pula sesuai dengan hasil pertemuan dua budaya. Keselarasan dan sinkronisasi yang terjadi karena antara agama Islam dan budaya Minangkabau dapat digandengkan dengan terbukanya pertimbangan para pelakunya. Walaupun wujud diferensiasi, tetapi ada identitas kolektif yang bermakna kemudian digunakan untuk memaknai tradisi masa lalu dengan kehadiran Islam sebagai agama yang baru diterima. Temuan Irfan Ahmad menunjukkan adanya kritik yang tidak menempatkan tradisi sebagai bagian beragama. Padahal dalam pembentukan nilai selalu saja masa lalu masih memiliki posisi yang khas dalam setiap kebaruan yang muncul.³⁵ Secara fungsional, tradisi bisa saja menolak perubahan dan menggantinya dengan ajaran agama yang datang. Pada sisi lain, justru legitimasi untuk kemudian mengikat budaya yang ada dengan legitimasi pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan dengan kerangka Islam terbentuk menjadi sebuah kesatuan yang baru.

Dua pola yang muncul dalam akulturasi budaya dengan agama adalah bentuk dialogis dan integratif. Jika dalam budaya Jawa, Islam dan budaya mengambil pola dialogis, maka sebaliknya dalam tradisi Melayu mengambil bentuk integratif. Pada budaya Jawa, Islam berhadapan dengan budaya Kejawen bahkan muncul dalam bentuk ketegangan ketika Islam mulai menyebar di masa kolonial. Ada pula resistensi dari budaya lokal dan tradisi yang sudah mengakar. Sehingga muncul perbedaan pandangan antara penafsiran legal dengan penafsiran mistis. Respon terhadap keyakinan dalam budaya senantiasa menunjukkan toleransi yang memadai, kalau tidak dikatakan sebagai penerimaan.³⁶ Sementara pola integrasi, Islam berkembang dan masuk menjadi penyanggah terpenting dalam struktur masyarakat, termasuk dalam urusan politik. Gambaran bentuk integratif ini seperti dalam budaya Melayu dan Islam. Islam

³⁵ Irfan Ahmad, "Immanent Critique and Islam: Anthropological Reflections", *Anthropological Theory*, No. 01 (2011), hlm. 107.

³⁶ Jonathan Mark Crosby, *An Analysis of the Contemporary Spiritual Warfare Movement in Light of Reader-Response Methodology and the Significance for Missionary Strategy Targeting Javanese Muslims*, Disertasi (Southwestern: The Roy Fish School of Evangelism and Missions, 2011).

terbentuk menjadi karakter bagi kelangsungan budaya di lapisan masyarakat. Ini semakin dipermudah dengan tersedianya struktur kerajaan dan kesultanan yang masih tetap berdiri berdampingan dengan nilai demokrasi. Secara kultur kemudian terjadi model yang berjalan sebagaimana struktur masyarakat yang ada.³⁷Sebagaimana diajukan pertama kali oleh Durkheim dengan melihat posisi agama dan masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat Australia, situasi ini berada dalam kondisi dimana arus modernisme berlangsung. Agama tetap menjadi salah satu tumpuan, termasuk dalam kondisi ketika tidak menerima salah satu agama apapun.

Adapun dalam budaya Minangkabau, Islam melembaga menjadi kekuatan sosial. Penghargaan terhadap pribadi orang Minangkabau ditentukan pada kemauan dan kemampuannya menjaga *Kato nan Ampek; Raso, Pareso, Malu, dan Sopan* (Kata yang Empat; Rasa, Periksa, Malu, dan Sopan). Pelembagaan *Kato nan Ampek* ke dalam kehidupan sosio kultural dan kemudian mengamalkan secara intens yang pada gilirannya melahirkan harmoni kehidupan. Gambaran ini menegaskan bahwa citra orang Minangkabau sebagai penganut agama yang fanatik sekaligus memegang teguh ajaran adat yang telah diwariskan leluhur secara turun temurun. Mulder memandang bahwa ini dapat saja terjadi karena adanya keserasian dalam tradisi keagamaan sehingga terserap dalam tradisi yang sudah mapan. Sekaligus menolak adanya sinkretisasi dalam ajaran agama. Melainkan ajaran agama yang datang dalam status asing menemukan lahannya dalam budaya lokal.³⁸

3. Pengaruh Islam Terhadap Modal Sosial Orang Minangkabau di Perantauan

Dalam pandangan orang Minangkabau, Islam tidak hanya sebagai referensi perilaku sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

³⁷ Stephen Todd dan Andrew Steele, "Modelling a Culturally Sensitive Approach to Fuel Poverty", *Structural Survey*, no. 4 (2006), hlm. 300-310.

³⁸ Niels Mulder, *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 3-18.

Islam juga merupakan salah satu identitas etnis. Dalam perspektif antropologis, antara agama dengan orang Minangkabau merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua unsur tersebut saling menentukan dan keanggotaan seseorang dalam komunitas sangat ditentukan oleh kelekatan identitas tersebut.³⁹ Artinya, jika ada seseorang tidak lagi memeluk agama Islam, maka ia tidak dapat lagi disebut sebagai orang Minangkabau. Konsekuensinya keanggotaan sebagai bagian kelompok etnis Minangkabau telah tiada.

Kelekatan masyarakat Minangkabau dan Islam yang melahirkan sikap fanatisme itu juga terlihat dari kedekatan mereka terhadap pemimpin informal yang dikenal dengan sebutan *Buya* (orang-orang terpilih). Status *Buya*, apalagi yang sudah dikenal kualitas keulamaannya, mempunyai kharisma yang tinggi di hadapan mereka, melebihi posisi pemimpin formal sekalipun. Karena kedekatan dengan *Buya*, terutama bagi mereka yang pernah di didik di *Surau* itulah yang banyak mempunyai jiwa wiraswasta (*enterpreunership*) di perantauan. Hal ini bisa terjadi karena pendidikan *Surau* secara nyata mampu mendidik manusia untuk lebih mandiri.

Dengan demikian, bagi orang Minangkabau Islam memiliki landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang *committed* terhadap modal sosial. Islam juga memiliki komitmen terhadap kontrak sosial dan norma yang telah disepakati bersama; sebagaimana diketahui bahwa bangunan masyarakat muslim ciri dasarnya adalah *ta'awun* (tolong menolong), *takaful* (saling menanggung), dan *tadbomun* (memiliki solidaritas).⁴⁰

Ajaran Islam yang koheren dengan modal sosial itu terdokumentasikan dengan baik. Dalam perspektif sejarah, ditemukan bagaimana masyarakat Madinah dididik untuk membangun dan menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat yang ideal yang kerap disebut dengan masyarakat madani atau *civil society*; masyarakat yang

³⁹ Kusnadi, *Nelayan; Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, (Bandung: Utama Press, 2000), hlm. 50-51.

⁴⁰ Nana Mintarti, *Modal Sosial, Pembangunan Komunitas Madani dan Peran Amilin*, 2003, diakses 10 Januari 2018. <http://www.masyarakatmandiri.org/>.

menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang baik, berazas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial yang pada gilirannya terbentuk sebuah *good governance* yang tunduk pada sistem dan perundang-undangan yang akuntabel dan transparan.

Pertanyaannya, jika secara *das sollen* (keharusan) Islam merupakan agama yang memiliki ajaran dan perangkat kapital sosial yang mapan, apakah secara *das sein* (kenyataan) Islam telah mempengaruhi kapital sosial orang Minangkabau di perantauan? Pertanyaan ini cukup penting mengingat pembangunan manusia melibatkan proses menggali dan memunculkan modal sosial yang diwujudkan oleh perilaku aktual ummatnya dalam sebuah komunitas.

Dari penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan terhadap perantau Minangkabau yang terdapat di beberapa kota besar Indonesia seperti Jakarta, Medan, dan Yogyakarta, dijumpaibahwa optimalisasi ajaran Islam yang dituliskandiatas telah mewarnai kapital sosial mereka. Ini terlihat ketika organisasi-organisasi kelompok etnis Minangkabau di perantauan tidak lagi menafsirkan ajaran Islam hanya sebatas ibadah rutinitas biasa, tetapi sudah sampai kepada gerakan-gerakan sosial yang produktif untuk membangun kehidupan masyarakat yang ideal berdasarkan ajaran Islam.

Seperti yang terlihat pada Ikatan Keluarga Minang (IKM) Jakarta, Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM3) Medan, dan Ikatan Keluarga Besar Minangkabau Yogyakarta (IKBMY) di Yogyakarta. Organisasi-organisasi ini selain berfungsi sebagai jaringan perantau juga menjadi wadah yang mengorganisir berbagai aktivitas yang dianggap bermanfaat dalam meningkatkan kebersamaan dan mempererat hubungan silaturahmi antar sesama perantau Minangkabau. Kegiatan itu mencakup hubungan ke dalam dan ke luar organisasi. Pada dasarnya aktivitas-aktivitas

yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi tersebut merupakan implementasi dari program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan berbagai aktivitas ini mencakup berbagai aspek sosial kehidupan. Dalam bidang agama, organisasi ini rutin mengadakan aktivitas-aktivitas, seperti; pengajian, perayaan hari besar Islam, *halal bi halal*, dan majelis *taklim*. Pelaksanaan aktivitas-aktivitas keagamaan ini, sangat terkait dengan upaya untuk mempertahankan identitas keislaman etnis Minangkabau di tengah-tengah kemajemukan daerah perantauan. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa etnis Minangkabau sangat terikat dengan agama Islam.⁴¹ Selain itu, aktivitas-aktivitas ini merupakan salah satu kesempatan bagi etnis Minangkabau untuk saling bertemu dan saling mengenal. Dengan demikian hubungan silaturahmi di antara mereka akan semakin dekat dan kuat.

Sebagai sebuah organisasi sosial, aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan juga mencakup kepada aspek sosial yang produktif dalam kehidupan bermasyarakat di perantauan. Berbagai permasalahan yang dihadapi etnis Minangkabau di perantauan diakomodir dan kemudian dicarikan jalan keluar secara bersama-sama melalui musyawarah. Selain itu, organisasi perantauan ini juga melaksanakan aktivitas-aktivitas sosial lainnya seperti mengkoordinir pengumpulan sumbangan untuk diberikan kepada anggota-anggota yang sedang kesusahan, pengumpulan *zakat fitrah* pada bulan puasa, dan memberikan kepada masyarakat Minangkabau yang membutuhkan dan memang pantas untuk menerimanya.

Sebagai interpretasi hubungan batin terhadap kampung halaman yang sudah lama ditinggal, para perantau yang tergabung dalam organisasi sosial keminangkabauan ini tetap mempedulikan keadaan dan perkembangan kampung halaman. Hal ini mereka ekspresikan dengan mengkoordinir pengumpulan dana dan mengirimkannya ke daerah-daerah kampung halaman yang membutuhkan. Lebih lanjut, biasanya dana ini digunakan untuk

⁴¹ Usman Pelly. *Urbanisasi dan Adaptasi*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 37.

membantu daerah yang terkena bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan lain-lain.

Pengorganisasian berbagai aktivitas oleh organisasi sosial keminangkabauan ini, pada dasarnya tidak lain adalah sebagai media keterikatan antar etnis Minangkabau. Lewat aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi ini, orang Minangkabau yang ada di daerah perantauan bisa saling bertemu, saling mengenal, bahkan tidak jarang di antara mereka yang kemudian menemukan kerabatnya lewat berbagai aktivitas itu. Pada akhirnya tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan berbagai aktivitas ini adalah untuk menyatukan dan merekatkan hubungan silaturahmi antar sesama orang Minangkabau.

Terkait dengan hal ini, keterikatan etnis Minangkabau dalam organisasi-organisasi perantauan itu pada akhirnya membentuk sebuah jaringan sosial keminangkabauan. Jaringan tersebut diwujudkan dalam dua bidang, yaitu ekonomi dan hukum.

a. Bidang Ekonomi

Meski tinggal di perantauan, orang Minangkabau tetap menunjukkan sifat komunalnya. Hal ini diekspresikan dengan tolong-menolong yang terjadi di antara mereka. Tolong-menolong inibukan hanya di kehidupan sosial tetapi juga di aspek kehidupan lainnya, salah satunya di bidang ekonomi.

Dalam bidang ekonomi, salah satu masalah yang cukup menonjol adalah masalah pengangguran. Untuk mengatasi masalah pengangguran, salah satu cara yang ditempuh oleh organisasi-organisasi perantauan itu adalah mengupayakan untuk mencari peluang menembus berbagai instansi pemerintahan dan perusahaan swasta untuk mencari informasi berkaitan dengan kesempatan kerja. Dalam hal ini, organisasi keminangkabauan ini bekerjasama dengan para pengusaha, pejabat pemerintah dan para pedagang Minangkabau yang telah sukses. Organisasi ini kemudian menginformasikan

peluang tersebut kepada anggotanya yang belum bekerja atau masih menganggur.

Langkah selanjutnya yang dilakukan organisasi ini di bidang ekonomi adalah dengan mendirikan berbagai koperasi. Koperasi ini diharapkan akan membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian orang Minangkabau di daerah perantauan. Berkaitan dengan tujuan itu kemudian organisasi-organisasi keminangkabauan ini mengupayakan untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diprioritaskan untuk orang Minangkabau.

Hal ini menjadi kenyataan dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah Gebu Prima di Medan Sumatera Utara,⁴²BPR Panca Arta Monjali Yogyakarta dan BPR Arta Jakarta.⁴³Tujuan awal didirikannya beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini adalah untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) milik orang Minangkabau yang ada di daerah-daerah perantauan agar lebih berkembang dan maju. Selain itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini juga meminjamkan modal bagi masyarakat yang ingin memulai suatu usaha.

Seperti diketahui, orang Minangkabau kalangan menengah ke bawah yang tinggal di perantauan pada umumnya menekuni pekerjaan di sektor informal dengan membuka berbagai usaha kecil dan menengah (UKM), seperti; penjaja kaki lima, usaha konveksi (jahit), percetakan dan lain sebagainya. Secara tidak langsung upaya ini adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran dan juga meningkatkan kualitas perekonomian.

⁴² Melalui suatu proses yang cukup panjang, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah Gebu Prima ini berhasil didirikan pada tahun 1997. Pemilik saham Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah Gebu Prima ini seluruhnya adalah pengusaha-pengusaha Minangkabau, salah satunya adalah Ibu Djanius Djamin, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah masyarakat Minang (BM3) Sumatera Utara.

⁴³ Pemilik dan direktur utama BPR Panca Arta Monjali Yogyakarta dan BPR Arta Jakarta adalah bapak Jufri'al, SE (Ketua Ikatan Keluarga Besar Minangkabau Yogyakarta).

Kendati prioritas utama Bank Perkreditan Rakyat ini adalah untuk orang Minangkabau di perantauan, namun dalam perkembangannya, BPR ini tidak hanya dimanfaatkan oleh orang Minangkabau saja. Banyak masyarakat dari etnis-etnis lain yang juga memanfaatkan jasa perkreditan yang disediakan oleh BPR tersebut. Saat ini, BPR-BPR ini telah berkembang dengan pesat dan telah bisa disejajarkan dengan bank-bank lain yang ada di daerah-daerah sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Nasabahnya sebagian besar adalah orang Minangkabau yang tersebar di berbagai daerah di Perantauan itu.

b. Bidang Hukum

Pada bidang hukum, organisasi perantauan orang Minangkabau seperti BM3 di Medan, IKM di Jakarta dan IKBMY di Yogyakarta telah membentuk sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Lembaga hukum ini beranggotakan para pengacara yang berasal dari etnis Minangkabau. Sejak berdirinya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ini sudah sering membantu mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang Minangkabau yang ada di perantauan. Dalam setiap kasus yang dihadapi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ini mengupayakan untuk tidak memungut bayaran dalam bentuk apapun dari kliennya yang tidak lain adalah orang Minangkabau juga. Ini merupakan salah satu bentuk keterikatan keminangkabauan mereka.

Lebih lanjut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ini lebih mengarahkan usahanya dalam membela kepentingan orang Minangkabau di perantauan. Kasus-kasus yang mereka tangani antara lain, sengketa tanah, kasus penggusuran bangunan, penggusuran pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pertumbuhan lembaga ekonomi dan lembaga hukum yang dilakukan oleh organisasi-organisasi perantauan ini adalah untuk membela kepentingan

orang Minangkabau itu sendiri. Hal ini juga merupakan bukti keterikatan dan kepedulian mereka sebagai sesama orang Minangkabau.

Dimensi modal sosial yang dimiliki itu tidak hanya merupakan instrumen yang bisa meng-*generate* kapital sosial—sebagaimana dinyatakan Fukuyama. Melainkan juga mencerminkan adanya *trust* diantara jaringan kelompok dan anggota-anggotanya. Jaringan kelompok memberikan jaminan sosial kepada anggotanya sebagai timbal balik atas loyalitas kepercayaan anggota kepada kelompok. Kebijakan jaringan organisasi kelompok di bidang ekonomi dan hukum ini bisa dipandang sebagai instrumen dan sekaligus parameter modal sosial yang ideal dan progresif.⁴⁴

Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial semestinya memiliki kontribusi penting dalam menopang pembangunan komunitas. Pendekatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan memerangi kemiskinan dalam sebuah komunitas tidak hanya dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi saja, melainkan juga melalui penguatan modal sosial. Skema-skema perlindungan sosial, seperti asuransi sosial, bantuan sosial (*social assistance*), dan *social safety* bisa dijadikan pendekatan dalam mengentaskan ketimpangan di antara anggota komunitas. Model-model jaminan sosial berbasis masyarakat yang berazaskan Islam ini bisa menjadi pilihan terbaik dan patut ditumbuh kembangkan dimasa yang akan datang.

C. Simpulan

Islam memiliki landasan yang kuat terhadap kontrak sosial dan norma yang telah disepakati ummatnya. Islam juga mampu memberikan panduan nilai bagi seluruh diskursus kehidupan manusia

⁴⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, cet. Ke-2, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 25.

– baik yang bersifat sosial-budaya, politik, maupun ekonomi. Orang Minangkabau di perantauan berusaha mengoptimalkan wujud nyata dari ajaran Islam tersebut. Sehingga Islam sangat berpengaruh dan mewarnai modal sosial mereka. Hal ini terlihat ketika organisasi-organisasi kelompok etnis Minangkabau yang terbentuk di perantauan tidak hanya menafsirkan ajaran Islam sebatas ibadah rutinitas biasa, tetapi Islam ikut serta dalam dialektika kapital sosial organisasi, sehingga mengarahkan kegiatan mereka kepada gerakan-gerakan sosial yang produktif dan positif untuk membangun kehidupan masyarakat yang ideal.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Irfan, "Immanent Critique and Islam: Anthropological Reflections", *Anthropological Theory*, Vol. 11, No. 1 (2011)
- Amir, Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Asyari, *Religiusitas dan Culture Belief dalam Prilaku Ekonomi Orang Minangkabau di Sumatera Barat*, Disertasi: Universitas Andalas, 2016.
- Bourdieu, Pierre, *The Forms of Capital* (Dalam Richardson, J.G. (ed), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, New York: Greenwood, 1986.
- Coleman, James S, *Foundations of Social Theory*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.
- Crosby, Jonathan Mark, "An Analysis of the Contemporary Spiritual Warfare Movement in Light of Reader-Response Methodology and the Significance for Missionary Strategy Targeting Javanese Muslims", *Disertasi*, Southwestern: The Roy Fish School of Evangelism and Missions, 2011.
- Damsar dan Indrayani, Isu-Isu Sosial Budaya. *Jurnal Antropologi*, Vol. 18 (1): 29-38 - ISSN 1410-8356, 2016.
- Darwis, R, *Transformasi Nilai-nilai Tradisi Kekeluargaan Masyarakat Minangkabau dalam Pendidikan Kewiraswastaan*, cet. II, Bandung: Pustaka Aulia Press, 2004.
- Djakfar, Muhammad, *Anatomi Perilaku Bisnis "Dialektika Etika dengan Realitas"*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Effendy, Bahtiar, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Emre, Irdam, *Networking Among Turkish-Speaking Migrants in London: The Benefits and Drawbacks of Social Capital*, Dissertation University of Cambridge, 2013.

- Fauzan, Pengaruh Religiusitas terhadap Etika Berbisnis (Studi pada RM. Padang di Kota Malang). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 15(1): 53-64. 2011.
- F and K. von Benda-Beckmann / *Asian Journal of Social Science*, 2010.
- Fukuyama, F. Social Capital, Civil Society and Development, *Third World Quarterly*, Vol. 22, No.1, 2001.
- Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Iskandar, Teuku. *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1970.
- Kahin, Audreu. *Dari Pemberontakan ke Intergrasi "Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1928-1998"*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Kato, Tsuyoshi, *Rantau Pariaman Dunia Saudagar Pesisir Minangkabau Abad XIX dalam Akira Nagazumi*. *Indonesia Dalam kajian Ekonomi Sarjana Jepang : Perubahan Sosial Ekonomi Abad XIX dan Berbagai Aspek Nasionalisme*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Kusnadi, *Nelayan; Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Utama Press, 2000.
- Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- _____. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cita, 1990.
- Lawang, R.M.Z, *Kapital Sosial: Dalam Perspektif Sosiologi Suatu Pengantar*, Ed, Ke-1, Jakarta: FISIP UI Press, 2004.
- _____, *Stratifikasi Sosial di Cancar-Manggarai, Flores Barat*, Disertasi: Universitas Indonesia, 1989.
- Mintarti, Nana, (2003), *Modal Sosial, Pembangunan Komunitas Madani dan Peran Amilin*, 2003. <http://www.masyarakatmandiri.org/>

- Mulder, Niels, *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Naim, Mochtar, *Merantau "Pola Migrasi Suku Minangkabau"*. Ed. Ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Parker, Gordon, "Bibiana Chan, Lucy Tully, dan Maurice Eisenbruch, Depression in the Chinese: The Impact of Acculturation", *Psychological Medicine*, Vol. 35 (2005).
- Pelly, Usman, *Urbanisasi dan Adaptasi*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Phillimore, Jenny. "Refugees, Acculturation Strategies, Stress and Integration", *Journal of Social Policy*, Vol. 40, No. 3 (Juli 2011)
- Portes, A. "Economic Sociology and the Sociology of Immigration: A Conceptual Overview". In A. Portes (ed). *The Economic Sociology of Immigration: Essayson Networks, Ethnicity and Entrepreneurship*, New York: Russell Sage Foundation, 1995.
- Putnam, R.D. *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*, *Journal of Democracy*, 6:65-78, 1995.
- Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1966.
- Rais, Zaim, *The Minangkabau Traditionalists' Response to The Modernist Movement*, Disertasi, Montreal: McGill University, 1994.
- Rante, Y. Pengaruh Budaya Etnis dan Perilaku Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Agribisnis di Provinsi Papua. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 12(2): 133-141. (2010).
- Ramayulis, *Traktat Marapalam "Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah"* (Diktum Keramat Konsensus Pemuka Adat dengan Pemuka Agama Dalam Memadukan Adat dan Islam di Minangkabau - Sumatera Barat). Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke 10. (2010).

- Ritzer, G dan Goodman D.J. *Modern Sociological Theory*, Mc.Graw-Hill: 2003.
- Rober N. Bellah. *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalism World*, Berkeley and Los Angeles of California Press, 1991.
- Robinson, L.J. Et.al. 2002. Is Sosial Capital Really Capital? Review of Sosial Economy. Vol. LX No.1.2002 dalam Lawang (2005).
- Shah, Sheetal R. *The Impact of Acculturation and Religion on Intergenerational Family Conflict for Second Generation Asian Indian Americans*, Tesis. Carbondale: Southern Illinois University, 2006.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, cetakan kedua, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Spradley, James. *The Ethnographic Interview*, New York : Rinehart & Winston, 1979.
- Todd, Stephen dan Andrew Steele. "Modelling a Culturally Sensitive Approach to Fuel Poverty", *Structural Survey*, Vol. 24, No. 4 (2006).
- Woolcock M and Narayan D. *Social Capital: Implication for Development Theory, Research, and Policy*, The World Bank Research Observer. Vol.15.No.2, 2000.
- Yulius, Slamet, *Modal Sosial dan Kemiskinan – Tinjauan Teoritik dan Kajian di Kalangan Penduduk Miskin di Perkotaan*. Surakarta: UNS press, 2012.
- Watzlawik, Meike. "Cultural Identity Markers and Identity as a Whole: Some Alternative Solutions", *Culture and Psychology*, Vol. 18, No. 2 (2012).
- Zamakhshyari, Dhofir. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1993.